

BAB IV

LANGKAH – LANGKAH ADVOKASI GERAKAN #MeToo DALAM PENANGANAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT

Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana dinamika kejahatan seksual di Amerika Serikat sebelum dan sesudah munculnya gerakan #MeToo yang telah membawa perubahan bagaimana pemerintah dan publik memandang kasus – kasus kejahatan seksual serta pudarnya stigma buruk yang menyertainya.

Dalam bab ini, penulis akan mengelaborasi proses – proses yang mengakibatkan gerakan #MeToo dapat membuat pengaruh – pengaruh serta fenomena – fenomena yang telah dibahas di bab sebelumnya.

A. PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN GERAKAN #MeToo

Sejak kemunculannya pada tahun 2000an awal, media sosial telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar alat untuk bersosialisasi. Dengan adanya globalisasi akibat dari kemajuan teknologi dan informasi, manusia dapat saling berkomunikasi dengan manusia lain yang berada di jarak yang melampaui kemampuannya untuk berkomunikasi secara langsung. Kemajuan teknologi memungkinkan komunikasi antar negara, bahkan benua, untuk dilakukan. Internet merupakan puncak dari kemajuan telekomunikasi. Berkat lahirnya Internet maka lahir pula media sosial. Seiring dengan kebebasan dalam beropini dan secara umum, mengekspresikan diri, maka media sosial menjadi sebuah wadah efektif untuk menyebarkan sebuah informasi yang mengandung nilai – nilai tertentu.

Media sosial telah berhasil membuktikan bahwa dirinya sangat efektif dijadikan sebuah wadah untuk

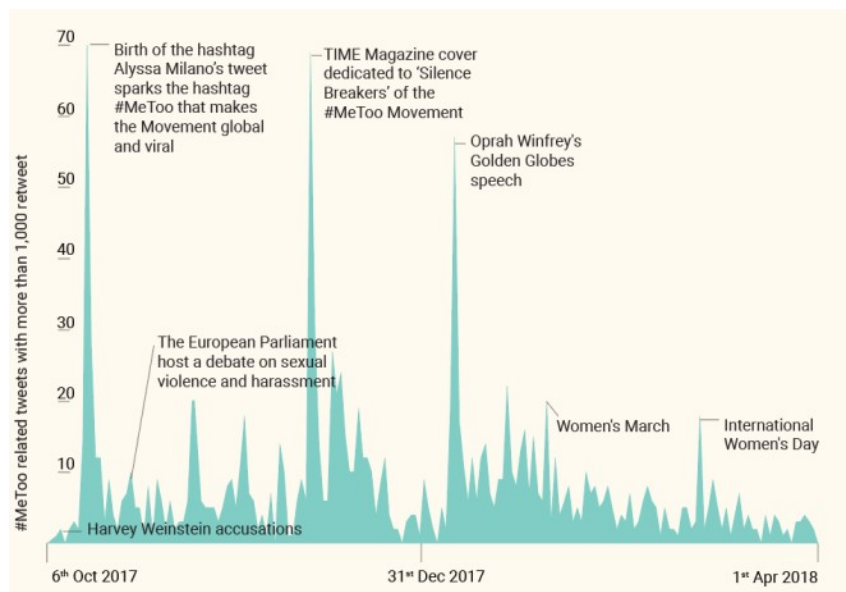
menyebarkan bermacam jenis informasi yang berguna atau penting bagi berbagai kalangan dan kepentingan. Di masa kini, orang – orang kebanyakan memilih untuk mendapatkan sumber berita dari media sosial ketimbang berita televisi atau koran karena pembaharuannya yang lebih terkini. Apapun yang terjadi di dunia dapat diberitakan segera dalam jangka waktu kurang dari satu jam pasca kejadian (Xiong, Cho, & Boatwright, 2019).

Menurut para peneliti, Sandoval-Almazan dan Gil-Garcia, terdapat empat tahapan yang dilakukan oleh gerakan sosial yang berbasis di media sosial dalam menjalankan tujuannya:

- 1) *Triggering event*: sebuah kejadian luar biasa yang mempromosikan sebuah reaksi sosial terhadapnya. Kejadian tersebut memecah *status quo* masyarakat, bersifat otonom, dan diatur oleh masyarakat.
- 2) *Media response*: dengan adanya media baru dan media tradisional yang meliput kejadian tersebut, keduanya menggunakan bermacam teknologi untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Cakupan luas ini kemudian memungkinkan adanya dukungan oleh sebuah kelompok dengan kepentingan yang sama dan terbentuknya sebuah organisasi gerakan yang viral.
- 3) *Viral organization*: organisasi gerakan yang viral mengembangkan identitas kolektif melalui pembuatan pesan konsisten yang bergerak dari media online ke offline, yang kemudian berujung kepada respons fisik.
- 4) *Physical response*: menempatkan gerakan ke dalam dunia nyata dapat menunjukkan kekuatannya, dan dapat mendorong orang lain untuk mempromosikan dan meniru

pergerakan ke wilayah lainnya (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014).

Ketika gerakan #MeToo digagas pertama kali oleh Tarana Burke pada tahun 2006, media sosial belum memiliki relevansi sebagaimana di masa sekarang. Pergerakan #MeToo oleh Burke umumnya hanya sebatas aktifitas di dunia nyata yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga selama sebelas tahun hingga munculnya tagar #MeToo yang dipicu oleh Alyssa Milano, gerakan yang dijalankan oleh Burke memang tidak begitu diketahui oleh khalayak ramai. Unggahan Milano telah mewujudkan dirinya sebagai bentuk nyata *triggering event* yang memicu partisipasi dari banyak pengguna media sosial lainnya hingga menjadi sebuah tagar yang viral. Pemberitaan terhadap gerakan #MeToo oleh media online maupun offline semakin gencar akibat dampak yang ditimbulkannya pada internet dan media sosial serta pengupasan kebenaran tentang figur – figur kuat dan berpengaruh di Hollywood. #MeToo kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi gerakan yang viral dan memiliki relevansi tinggi dalam perjuangan melawan kejahatan seksual dengan terus mendorong para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersuara dan melapor. Hingga munculnya aksi – aksi langsung yang didasarkan pada bangkitnya gerakan #MeToo seperti Women’s March, #TimesUp, dan lainnya.



Bagan 4-1: Grafik unggahan tagar #MeToo yang lebih dari 1,000 *retweet*, <https://medium.muz.li/the-anatomy-of-a-hashtag-a-visual-analysis-of-the-metoo-movement-ba4ec9b130b>

Kemajuan telekomunikasi telah berkontribusi besar terhadap kemampuan manusia untuk mengerti dan memahami bahasa yang asing baginya. Tagar #MeToo yang berasal dari bahasa Inggris dapat dipahami dan diserapi oleh negara – negara dengan bahasa berbeda sesuai dengan kosakata dan makna yang sesuai dengan bahasanya tanpa mengubah esensi dari kemunculan tagar tersebut pada awalnya. Gerakan #MeToo telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia tanpa mengubah pesan yang berusaha disampaikannya.

Nilai – nilai yang hidup dalam gerakan #MeToo memang didominasi oleh nilai – nilai liberalis. Para penggiat gerakan menganggap bahwa konservatisme menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kasus – kasus kejahatan seksual. Budaya patriarki yang dominan menyebabkan kaum perempuan dianggap lebih rendah sehingga rentan untuk mendapatkan perlakuan yang merendahkan. Dalam kepercayaan agama dan kebudayaan tertentu menilai bahwa perempuan wajib untuk memuaskan suaminya dalam kondisi

apapun, dan menganggap bahwa konsen tidak dibutuhkan dari sisi perempuan. Hal ini menyebabkan pemerkosaan dalam pernikahan bukan merupakan suatu hal yang aneh. Padahal, esensinya pemerkosaan tetap merupakan pemerkosaan. Baik di dalam ikatan pernikahan maupun tidak. #MeToo dalam hal ini dapat mempengaruhi segala kalangan dari latar belakang suku bangsa, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki nilai – nilai nya sendiri.

B. GERAKAN #MeToo SEBAGAI SIMBOL BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL.

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan sebuah masalah yang telah lama menggerogoti kehidupan manusia dan menimbulkan dampak traumatis dan fatal. Dominasi budaya patriarki dan apresiasi berlebihan terhadap maskulinitas dianggap menjadi salah satu dari sekian faktor terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terutama terhadap perempuan. Maskulinitas berlebihan berdampak terhadap pemikiran awam bahwa laki – laki lebih kuat dibandingkan perempuan, dan perempuan menganggap bahwa dirinya lemah dibandingkan laki – laki. Sehingga perempuan rentan mengalami pelecehan dan tidak sanggup melindungi diri.

Stigma buruk melekat erat terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat yang masih gemar menyalahkan korban ketimbang pelaku. Nilai – nilai yang diajarkan oleh beberapa kebudayaan, suku bangsa, dan agama di dunia mengakibatkan kecenderungan untuk menyalahkan korban ketika mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus – kasus tersebut melahirkan opini bahwa pakaian perempuan yang minim seringkali menjadi kambing hitam akan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Perempuan yang paling sering menjadi korban dianggap telah mengundang para pelaku itu sendiri dan kemudian menyalahkan mereka ketika tindak kejahatan seksual benar – benar terjadi.

Akibat dari adanya stigma buruk tersebut, kasus pelecehan dan kekerasan seksual menjadi sebuah hal yang sulit untuk dilaporkan oleh banyak korbannya karena takut menghadapi konsekuensi yang semakin parah. Intimidasi dijadikan senjata oleh para pelaku kejahatan seksual untuk membungkam korbannya agar tidak memberanikan diri untuk melapor. Semakin tinggi jabatan dan atau pengaruh yang dimiliki oleh seorang pelaku kejahatan seksual, maka semakin sulit bagi korbannya untuk dapat melaporkannya. Terutama jika kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di dalam lingkungan pekerjaan dan korbannya merupakan bawahan dari orang yang paling berpengaruh di tempat kerja tersebut. Ancaman yang dihadapi oleh para korban pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya berhubungan dengan karirnya saja, namun dapat berlanjut pada kehidupan pribadinya, keluarganya, bahkan keselamatan jiwa dan raganya sendiri. Dalam kasus tertentu, seorang perempuan yang telah diperkosa cenderung akan langsung dibunuh setelahnya dengan harapan bagi pelaku bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh siapapun.

Kesulitan – kesulitan yang dialami para korban pelecehan dan kekerasan seksual mengakibatkan mereka dapat memahami bahwa penyebab utama dari maraknya kasus – kasus tersebut serta stigma buruk yang melekat pada korbannya adalah akibat dari kurangnya kesadaran akan masalah itu sendiri. Masyarakat awam masih meremehkan inti dari masalah pelecehan dan kekerasan seksual. Mereka tidak memahami efek yang ditimbulkan pada korbannya. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku, dan kecenderungan menyelesaikan kasus pemerkosaan melalui jalan damai, dan bahkan dalam beberapa kasus, malah menikahkan pelaku dengan korbannya (terutama jika korbannya hamil setelah diperkosa) mengakibatkan kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak dinilai cukup penting sebagaimana masyarakat memandang kasus pembunuhan atau perampokan.

Gerakan #MeToo lahir sebagai akibat dari kesadaran para korban seksual bahwa membungkam diri terhadap kejahatan yang dialaminya tidak akan menyelesaikan apapun dan hanya membuat hal yang sama dapat terjadi berulang kali terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Tarana Burke menggagas #MeToo setelah mendengar cerita dari seorang anak perempuan yang ditemuinya bertahun – tahun lalu. Burke menyadari bahwa sebuah simbol dibutuhkan untuk para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersatu dan memperjuangkan keadilan yang pantas mereka dapatkan, begitupula dengan pelakunya. Dengan adanya #MeToo, Burke berharap bahwa para korban pelecehan dan kekerasan seksual yang belum menyuarakan pengalamannya dapat berani untuk berbicara. Ia sangat memahami pentingnya untuk bersuara agar khalayak umum yang belum memahami gentingnya kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual agar dapat lebih memahami hal tersebut, sehingga stigma buruk dapat secara perlahan mulai dihilangkan dan konsekuensi terhadap para pelaku dapat diterapkan secara pantas.

Tagar – tagar lain bermunculan setelah penyebaran luas gerakan #MeToo di seluruh dunia. Versi lain dari #MeToo seperti #MoiAussi di Kanada dan #WoYeShi di China telah berhasil menjalankan tujuan dari gerakan #MeToo di negara masing – masing tanpa mengubah esensi dari #MeToo itu sendiri. Penulis memilih untuk membahas #MeToo sebagai fokus dalam penelitian ini karena #MeToo merupakan induk dari beragam macam tagar – tagar dan gerakan – gerakan tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang bermunculan di media sosial. Warta berita, pakar, peneliti, serta figur – figur berpengaruh yang menyebarkan informasi tentang kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual setelah bulan Oktober tahun 2017 pada umumnya menjadikan gerakan #MeToo sebagai rujukan mereka.

Jumlah unggahan oleh gerakan – gerakan sosial yang menggunakan tagar #MeToo, 2018

Gerakan social	Username Twitter	Jumlah unggah an #MeTo o
9to5 National Association of Working Women	@9to5org	23
Concerned Women for America	@cwfora	4
End Rape on Campus (EROC)	@endrapeonca mpus	68
Equality Now	@equalitynow	13
Equal Rights Advocates	@equalrightsa dv	58
Feminist Majority Foundation	@femmajority	11
Center for Health and Gender Equity	@genderhealth	2
International Women's Health Coalition	@intlwomen	15
Institute for Women's Policy Research	@iwpresearch	22
Madre	@madrespeaks	3
Ms. Foundation for Women	@msfoundatio n	35
National Coalition Against Domestic Violence	@ncadv	9
National Partnership for Women and Families	@npwf	25
Urgent Action for Women's Human Rights	@urgentact	5
US Women's Chamber	@uswcc	1
V-Day	@vday	2

Vital Voices Global Partnership	@vitalvoices	4
Futures without Violence	@withoutviolence	47
Women Employed	@womenemployed	17
Women's Law Project	@womenslawproj	6
Women's Media Center	@womensmediacntr	36
Total		n = 408

Sumber:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811118302303>

C. PERAN SELEBRITI DAN POLITISI DALAM KESUKSESAN PENYEBARAN GERAKAN #MeToo

Gerakan #MeToo sebagai sebuah gerakan sosial membutuhkan dukungan dari aktor – aktor yang kuat untuk dapat melakukan advokasi dalam masalah kejahatan seksual di Amerika Serikat. Dalam *Transnational Advocacy Network*, taktik ini dikenal dengan sebutan *leverage politics* (Keck & Sikkink, 1999). Gerakan sosial membutuhkan partisipasi dari aktor – aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi munculnya sebuah *trigger event* yang kemudian membuat isu yang berusaha diangkat menjadi relevan untuk pembahasan oleh masyarakat.

Kesuksesan gerakan #MeToo tidak dapat mengesampingkan aktor yang telah berhasil mengangkat tagar dan gerakan tersebut pada awalnya, yaitu selebriti. Di masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa orang – orang yang memiliki ketenaran, secara otomatis memiliki kemampuan untuk mengangkat sebuah isu tertentu walaupun ia tidak memiliki keahlian secara khusus di dalam isu tersebut.

Gerakan #MeToo telah membuktikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dapat terjadi kepada siapapun, bahkan kalangan seperti selebriti yang pada umumnya dianggap memiliki kehidupan yang lebih dibandingkan dengan kalangan yang lebih awam.

Suatu esensi yang berusaha diperlihatkan oleh #MeToo adalah *relatability*, dalam hal ini. #MeToo berusaha memperlihatkan bahwa semua orang, tidak memandang status, ras, agama, suku bangsa, dan kebudayaan, dapat mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Selebriti yang menggiatkan gerakan #MeToo telah berhasil menjalankan nilai tersebut. Mereka telah berhasil mencontohkan keberanian untuk bersuara dan menceritakan serta melaporkan kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka menyadari akan keistimewaan yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk menggerakkan massa berjumlah besar untuk meramaikan sebuah tujuan.

Ranah politik Amerika Serikat memanfaatkan momentum dari kemunculan gerakan #MeToo di industri perfilman dengan mengangkat isu – isu pelecehan dan kekerasan seksual sebagai sebuah isu yang diangkat pada kampanye. Kemunculan #MeToo ditengah masa awal jabatan presidensial Donald Trump menjadi sebuah gebrakan baru dalam perpolitikan. Partai Democratic yang menjunjung tinggi nilai – nilai liberal menggunakan gerakan #MeToo sebagai pendongkrak popularitas, namun hal yang sama juga dilakukan oleh lawannya, Partai Republican, yang turut menggali informasi lebih dalam tentang kader – kader Partai Democratic untuk menjatuhkan mereka kembali. Sepanjang masa kampanye menjelang pemilihan *mid-term* 2018, isu – isu pelecehan dan kekerasan seksual digunakan dengan masif oleh masing – masing pihak. Tuduhan terhadap Donald Trump, Brett Kavanaugh, dan banyak politisi – politisi lain baik dari Partai Republican dan Democratic semakin mengencarkan penyebaran gerakan #MeToo.

Peran figur penting dan berpengaruh seperti selebriti yang menjadi awal kebangkitan gerakan #MeToo juga menyuarakan pentingnya partisipasi politik untuk membawa perubahan. Salah satu bukti nyata akan pengaruh selebriti adalah dampak dari unggahan di media sosial Instagram oleh penyanyi dan penulis lagu, Taylor Swift, yang menyatakan dukungannya terhadap dua kandidat Partai Demokrat dari negara bagian Tennessee, Phil Bredesen, untuk kongres, dan Jim Cooper untuk senat. Pasca unggahan Swift, terdapat peningkatan jumlah calon pemilih tetap terdaftar dalam waktu 24 jam sebanyak 64 ribu di seluruh Amerika. Jumlah tersebut meningkat menjadi 212,871 dalam dua hari, dan 131,161 diantaranya merupakan kelompok usia antara 18 hingga 29 tahun. Walaupun tidak dapat dipastikan apakah unggahan Swift yang menimbulkan dampak tersebut, namun fakta bahwa Swift memiliki pengikut media sosial Instagram sebanyak 112 juta pengguna dapat dianggap sebagai faktor yang cukup wajar. Mengingat Swift sebelumnya tidak berpartisipasi aktif dalam menyuarakan opini politiknya kepada ranah publik, terutama pada pemilihan presiden tahun 2016. Swift sendiri merupakan salah satu korban pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya di tahun 2013 oleh seorang *disk-jockey* bernama David Mueller sebuah radio yang berbasis di Denver, Colorado. Swift memenangkan tuntutan banding atas Mueller yang menuntutnya atas dugaan tuduhan palsu yang menyebabkan Mueller dipecat dari radio tempatnya bekerja (Gonzalez, McLean, Weisfeldt, & Gauk-Roger, 2017). Swift juga termasuk salah satu dari “*The Silence Breakers*”, yaitu para korban pelecehan dan kekerasan seksual yang diberikan penghargaan “*Person of the Year*” tahun 2017 oleh majalah TIME atas penyuaaran kasus – kasus kejahatan seksual yang mereka alami (Dockterman, 2017).

Di luar kepentingan politik partai maupun pengalaman pribadi yang dialami oleh para selebriti, gerakan #MeToo telah membawa perubahan, walau tidak secara menyeluruh, tentang pandangan masyarakat awam terhadap kasus – kasus

pelecehan dan kekerasan seksual. Stigma buruk tentang korban secara perlahan sudah mulai berkurang. Masyarakat telah mulai menyuarakan dan menuntut pertanggung jawaban dari para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Di dalam ranah internet, dikenal sebuah budaya baru yang dikenal sebagai *cancel culture*, sebuah istilah yang muncul dari media sosial Twitter sebagai salah satu dampak lain gerakan #MeToo. Didefinisikan oleh Lisa Nakamura, seorang professor di Universitas Michigan sebagai “sebuah persetujuan untuk tidak memperkuat, memperluas, atau memberikan perhatian atau materiil kepada seseorang (terutama seseorang yang terkenal dan berpengaruh), ketika seseorang tidak memberikan orang lain perhatian, maka ia juga merampas kehidupan mereka” (Bromwich, 2018). *Cancel culture* menjadi faktor yang mengakibatkan pasca gerakan #MeToo, para figur – figur terkenal, kuat, dan berpengaruh mengalami pemboikotan. Masyarakat menilai bahwa dengan “membatalkan” seseorang, maka mereka telah memberikan hukuman sosial. Terutama jika figur bersangkutan tidak mengalami persekusi secara hukum.

D. KELAHIRAN ME TOO CONGRESS ACT

Pada bulan November tahun 2017, seorang anggota kongres Amerika Serikat, Jackie Speier, mengajukan sebuah rancangan undang – undang yang dinamakan *Member and Employee Training and Oversight on Congress Act (ME TOO Congress Act)* yang dinamakan dari gerakan #MeToo. Rancangan ini berupaya untuk mengamandemen undang – undang serupa yang mengatur tentang pelecehan dan kekerasan seksual di dalam ranah kongres yang bernama *Congressional Accountability Act of 1995*. Speier mengajukan rancangan undang – undang baru karena menganggap bahwa undang – undang lama mengakibatkan proses pengaduan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhambat karena harus melalui sebuah kantor pengaduan yang membutuhkan kerahasiaan dalam pelaporannya dan melalui proses konseling dan mediasi yang lama sebelum pelaporan

kasus dapat diajukan. Adanya proses yang rumit serta panjang kerap menyebabkan pengajuan kasus – kasus pelecehan dan kekerasan seksual cenderung tidak berakhir dengan baik. Para pelaku dengan mudah dapat menghindari konsekuensi akibat perbuatannya (Davis, 2017).

Dalam *ME TOO Congress Act*, Speier mengajukan beberapa perubahan, diantaranya adalah:

- Menghapuskan syarat untuk proses konseling dan mediasi selama 30 hari sebelum pelaporan resmi dapat diajukan.
- Menciptakan sebuah proses konseling baru yang bersifat opsional, tidak mengekang, dan dapat menyediakan saran hukum dan perwakilan hukum bagi para pelapor.
- Menghapus syarat bagi para pelapor untuk menandatangani perjanjian tertutup untuk mengajukan laporan, walaupun perjanjian tertutup tetap diperbolehkan sebagai bagian dari negosiasi penyelesaian masalah.
- Membuat sistem online untuk melaporkan keluhan.
- Mewajibkan para pembuat undang – undang untuk membayar denda dari segala tuntutan yang dimenangkan korban apabila mereka tertuduh sebagai pelaku pelecehan, tuntutan lain tetap dibayarkan oleh para pembayar pajak
- Mewajibkan keterbukaan dalam pembahasan denda ketika tuntutan dimenangkan dan keterbukaan dalam menentukan jumlah denda.
- Mewajibkan sebuah survey secara anonim terhadap pejabat kongres setiap dua tahun
- Memperluas perlindungan pelecehan kepada seluruh jajaran kongres dari tingkatan teratas hingga yang terbawah.

Rancangan undang – undang tersebut lahir dari pemikiran Speier bahwa “kebijakan *zero tolerance* (terhadap kasus pelecehan seksual) akan percuma apabila tidak didukung dengan pelaksanaan dan akuntabilitas.” Undang – undang ini merupakan langkah tambahan dari langkah terbaru kongres dan senat untuk mewajibkan pelatihan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang sebelumnya bersifat opsional.

Speier telah menjadi penyuar penting terkait perlawanan pelecehan dan kekerasan seksual di Capitol Hill sejak ia menceritakan pengalamannya mendapatkan pelecehan seksual dari seorang kepala staff beberapa dekade lalu ketika ia masih menjabat sebagai pendamping kongres. Ia bertestimoni pada sebuah sidang kongresional bahwa ia menyadari dan mengetahui adanya dua anggota kongres yang telah melakukan kejahatan seksual, namun ia menolak untuk mengungkapkan persisnya siapa pelaku kasus tersebut karena menghargai korbannya yang tidak ingin terangkat namanya.

Dengan lahirnya *ME TOO Congress Act*, dapat dilihat bahwa gerakan #MeToo telah memicu para pembuat kebijakan untuk dapat menjalankan akuntabilitas mereka terhadap apa yang telah mereka rumuskan. Proses untuk menghapuskan kejahatan seksual masih menjadi perjalanan panjang bagi pemerintah Amerika Serikat. Namun, upaya untuk menangani kasus di dalam ranah legislatif sudah menjadi sebuah tindakan yang perlu diapresiasi.